

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan regresi data panel mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap IPM di 33 Provinsi Indonesia, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menghasilkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB perkapita) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia. Nilai koefisien sebesar 0,053655 dan derajat signifikansi sebesar 1%. Artinya, ketika terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB perkapita) sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,053%.
2. Penelitian ini menghasilkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia. Nilai koefisien sebesar 0,033958 dan derajat signifikansi sebesar 1%. Artinya, ketika belanja daerah yang dibelanjakan meningkat sebanyak 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,033%.
3. Penelitian ini menghasilkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 33 Provinsi Indonesia. Nilai koefisien sebesar -0,009382 dan derajat

signifikansi sebesar 5%. Artinya, ketika terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,009%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya pemerintah daerah harus memperhatikan masalah pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan dan hasil-hasilnya agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Pemerataan kesempatan juga harus tersedia baik semua orang perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan.
2. Pemerintah khususnya pemerintah daerah harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan belanja daerah yang menjadi pendukung Indeks Pembangunan Manusia. Perlu adanya kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja supaya lebih terfokus pada program sasaran, dan memperkecil belanja yang berupa upah/gaji/honor bikrorat atau mitra pelaksanaan program. Program yang dimaksud adalah di bidang kesehatan, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dengan memperluas “pasar untuk produk-produk regional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak.

3. Pemerintah perlu memperhatikan masalah yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan agar Indeks Pembangunan Manusia dapat lebih ditingkatkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini hanya sebanyak 3 (tiga) variabel, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk Miskin. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen. Variabel independen yang digunakan bukan hanya faktor-faktor eksternal saja, namun faktor-faktor internal juga bisa digunakan.
2. Rentang waktu periode (t) yang diteliti bisa diperpanjang lebih dari 5 tahun sehingga hasil yang didapat lebih mencerminkan kondisi pembangunan manusia yang lebih nyata.
3. Penggunaan variabel belanja daerah secara keseluruhan kurang mencerminkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Diperlukan adanya variabel yang lebih spesifik seperti : pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan pendidikan.